



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG
PENGADILAN AGAMA PURWOREJO**

Jalan Pahlawan Nomor 5 RT 002 RW 007, Kledung Kradenan, Kecamatan Banyuurip
Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah 54171 www.pa-purworejo.go.id, info@pa-purworejo.go.id

**PENGUMUMAN
UJI KOMPETENSI CALON PENYEDIA DALAM RANGKA
PENGADAAN JASA KONSULTANSI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM
PADA PENGADILAN AGAMA PURWOREJO TAHUN 2026**

Nomor: 1990/KPA.PA.W11-A20/PL1.1.5/XII/2025

Pengadilan Agama Purworejo Kelas Ib akan melaksanakan Uji Kompetensi dalam rangka seleksi calon penyedia jasa konsultasi layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Purworejo Kelas Ib tahun 2026, dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Paket Pekerjaan

Nama Paket Pekerjaan	: Pengadaan Jasa Konsultasi Layanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2026
Lingkup Pekerjaan	: Pemberi Layanan Bantuan Hukum
Lokasi Pekerjaan	: Pengadilan Agama Purworejo Kelas Ib
Alamat	: Jl. Pahlawan No.5, Banyuurip, Purworejo, Jawa Tengah
Nilai Total HPS	: Rp39.000.000,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah)
Volume pekerjaan	: 12 (dua belas) bulan
Sumber Dana	: DIPA Pengadilan Agama Purworejo TA 2026

B. Persyaratan Administrasi

1. Lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/ atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/ atau Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perguruan Tinggi;
2. Memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. atau izin dari Rektor bagi Perguruan Tinggi;
3. Telah Terakreditasi sebagaimana SK Kemenkumham Tahun 2025 s/d 2027;
4. Memiliki Surat Keterangan Domisili setempat sesuai dengan Kabupaten/Kota Pengadilan Agama;
5. Memiliki minimal 1 orang Advokat dibuktikan dengan kartu tanda anggota Perhimpunan/Ikatan Profesi dan berita acara sumpah yang berlaku, yang akan ditugaskan sebagai Tim Leader;
6. Memiliki minimal 1 orang staf atau anggota yang memiliki gelar Sarjana Hukum atau Sarjana Syariah dibuktikan dengan Surat Keterangan Penugasan. (Jika

menyertakan Mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus yang telah menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara yang dibuktikan dengan Kartu Hasil Studi (KHS));

7. Memiliki NPWP dibuktikan dengan fotokopi kartu NPWP;
8. Melampirkan bukti telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan Tahun 2024);
9. Memiliki rekening atas nama lembaga/ organisasi (surat keterangan bank/fotokopi rekening koran);
10. Memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultasi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak dibuktikan dengan melampirkan Kontrak/SPK dan BAST;
11. Pakta Integritas yang berisi:
 - a) Tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan/atau nepotisme;
 - b) Akan melaporkan kepada APIP Badan Pengawasan Mahkamah Agung R.I jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi dan/atau nepotisme dalam proses pengadaan ini.
 - c) Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan professional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a), b) dan/atau c) maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
12. Surat pernyataan yang berisi:
 - a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
 - b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
 - c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
 - d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
 - e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara.

C. Jadwal Kegiatan

No	Kegiatan	Hari	Tanggal
1	Pendaftaran dan penyerahan dokumen syarat administrasi	Rabu-Jumat	17-19 Desember 2025
2	Pengumuman lulus administrasi	Senin	22 Desember 2025
3	Ujian Kompetensi (tertulis dan/atau lisan/wawancara)	Selasa	23 Desember 2025
4	Pengumuman hasil uji kompetensi	Rabu	24 Desember 2025

D. Ketentuan Lain-Lain

1. Peserta uji kompetensi dengan hasil nilai tertinggi selanjutnya akan diundang oleh Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan yang berlaku melalui aplikasi SPSE INAPROC Mahkamah Agung.
2. Hasil seleksi uji kompetensi tidak dapat diganggu gugat.
3. Apabila terjadi perubahan ataupun penghapusan anggaran yang menyebabkan tidak tersedianya anggaran Pos Bantuan Hukum dalam DIPA Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2026, maka hasil uji kompetensi dibatalkan dan calon penyedia tidak dapat menuntut ganti rugi kepada tim seleksi.

Kepada Lembaga pemberi layanan bantuan hukum yang berminat, dapat melakukan pendaftaran dan menyerahkan seluruh dokumen persyaratan administrasi dalam bentuk fisik (*hardcopy*) dan/atau *softcopy* yang ditujukan kepada **Tim Uji Kompetensi Seleksi Calon Penyedia Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Purworejo Tahun 2026**, dengan alamat **Jalan Pahlawan Nomor 5, Banyuurip, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah**, email: info@purworejo.go.id

Demikian disampaikan untuk diketahui

Purworejo, 17 Desember 2025

ttd

Ketua Tim Uji Kompetensi